

TATA KELOLA PENANGGULANGAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG: PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYYAH*

Muhammad Lutfi Nazir¹, Fathul Mu'in², Alan Yati³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

email: lutfinazir097@gmail.com¹, fathulmuin@radenintan.ac.id², alanyati@radenintan.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 05-07-2026

Revised : 19-07-2026

Accepted : 27-07-2026

KEYWORDS

Executive Policy; Slums; Public Policy; Local Regulations; Way Lunik.

KATA KUNCI

Siyasah Tanfidziyyah;
 Permukiman Kumuh;
 Kebijakan Publik;
 Peraturan Daerah; Way Lunik.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Article 31 of Bandar Lampung City Regulation No. 4 of 2017 on the eradication of slums in Way Lunik Village and examines it from the perspective of siyasah tanfidziyyah. Using a qualitative-descriptive approach based on field research, primary data were collected through observation and structured interviews with seven key informants (comprising representatives from the Housing and Settlement Agency, Way Lunik Village officials, community leaders, and affected residents), while secondary data included local regulations and fiqh siyasah literature. Data analysis was conducted using an interactive qualitative method through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that, normatively, Article 31 has provided a legal basis for settlement mitigation actions. However, implementation on the ground has not been optimal due to constraints regarding the legal status of PT BCKA's land assets, a waste collection program that remains sporadic, and a lack of oversight. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, the implementation of this policy has not fully fulfilled the principles of amanah, justice (al-'adl), protection of rights (hifz al-huquq), and public accountability. This study concludes that there is a need to formulate legal discretion regarding land disputes, provide daily operational resources, and strengthen the values of siyasah tanfidziyyah so that slum mitigation efforts are oriented toward sustainable public welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang penanggulangan permukiman kumuh di Kelurahan Way Lunik serta meninjaunya dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi lapangan (field research), data primer dihimpun melalui observasi dan wawancara terstruktur bersama 7 informan kunci (terdiri atas pihak Dinas Perumahan dan Permukiman, aparaturnya Kelurahan Way Lunik, tokoh masyarakat, dan warga terdampak), sedangkan data sekunder mencakup regulasi daerah dan literatur fiqh siyasah. Analisis data dilakukan secara interaktif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 31 telah memberikan landasan hukum bagi tindakan penanggulangan permukiman. Namun, implementasi di lapangan belum optimal akibat kendala status legalitas tanah aset PT BCKA, program pengangkutan sampah yang masih bersifat insidental, serta minimnya pengawasan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, keadilan (al-'adl), perlindungan hak (hifz

al-ḥuquq), dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menyimpulkan perlunya formulasi diskresi hukum terkait sengketa lahan, penyediaan sarana operasional harian, dan penguatan nilai-nilai siyasah tanfidziyyah agar penanggulangan permukiman kumuh berorientasi pada kemaslahatan publik yang berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Urbanisasi merupakan fenomena struktural dalam pembangunan modern yang menimbulkan konsekuensi yuridis dan administratif yang signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Setiadi, 2022) Pertumbuhan kawasan perkotaan yang berlangsung secara cepat sebagaimana terdapat di negara berkembang sering kali tidak diimbangi dengan kapasitas regulasi, perencanaan serta pengawasan yang memadai sehingga memicu munculnya kawasan permukiman kumuh. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak atas perumahan layak, kelemahan pengendalian tata ruang juga keterbatasan kebijakan publik dalam menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Permukiman kumuh dengan demikian tidak hanya merupakan persoalan fisik dan lingkungan tetapi juga persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan yang berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga negara, kesehatan publik, keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan perkotaan (Mirza, 2024).

Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menanggulangi permukiman kumuh melalui instrumen hukum berupa peraturan daerah sebagaimana yang terlihat saat ini bahwa kota Bandar Lampung dapat disebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung yang menghadapi dinamika urbanisasi yang cukup kompleks. Pertumbuhan penduduk yang pesat, keterbatasan lahan perkotaan dan juga kondisi sosial-ekonomi masyarakat mendorong munculnya kawasan permukiman yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyadari kondisi ini sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang secara rinci dan khusus dituangkan pada Pasal 31 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanggulangan permukiman kumuh melalui pencegahan, peningkatan kualitas lingkungan, penataan Kawasan dan pelibatan masyarakat.

Aspek permasalahan timbul disini melalui realitas dari implementasi kebijakan yang sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dan praktik di lapangan yang meskipun

kerangka normatif itu sendiri sudah ada dan berlaku. Hambatan seperti lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, minimnya mekanisme evaluasi juga rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu dari beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan penanggulangan permukiman kumuh (Rangga, 2026). Kondisi ini juga terlihat khususnya di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang yang hingga kini masih menghadapi persoalan kepadatan hunian, keterbatasan infrastruktur dasar dan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Situasi tersebut menegaskan bahwa persoalan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan teknokratis tetapi memerlukan evaluasi mendalam terhadap kinerja pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. (Ponto & Pangemanan, 2022)

Pembahasan dari beberapa kajian terdahulu mengenai penanggulangan permukiman kumuh umumnya berfokus pada aspek implementasi kebijakan daerah, program teknis pemerintah atau juga pada pendekatan hukum administrasi dan lingkungan saja. Penelitian yang beberapa dijumpai banyaknya yang menelaah efektivitas peraturan daerah atau program nasional seperti Kota Tanpa Kumuh (*Kotaku*) (Pratama, 2022) namun sebagian besar belum mengintegrasikan analisis hukum positif dengan perspektif *fiqh siyasah* sebagai landasan teori untuk refleksi khususnya pada perspekti *siyasah tanfidziyyah* dan juga Penelitian ini membahas secara spesifik mengkaji implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 pada konteks lokal yang terdapat di Kelurahan Way Lunik masih sangat terbatas (Hakim, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) baik dari sisi pendekatan normatif-etik maupun dari aspek lokasi dan fokus kebijakan yang dianalisis.

Penelitian ini memiliki keunikan (*novelty*) dengan memadukan analisis implementasi kebijakan penanggulangan permukiman kumuh berdasarkan hukum daerah dengan perspektif *siyasah tanfidziyyah* sebagai kerangka evaluatif. Penelitian ini tidak hanya menilai sejauh mana Pasal 31 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 dilaksanakan tapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu

memberikan sudut pandang baru dalam kajian hukum tata negara khususnya dalam perspekti hukum Islam dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan publik.

Tujuan penelitian ini secara spesifik yaitu untuk menganalisis implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 dalam upaya penanggulangan permukiman kumuh di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang serta menilai implementasi tersebut dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum tata negara Islam sekaligus menjadi masukan normatif dan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan penanggulangan permukiman kumuh yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Anger et al., 2025)

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis berbasis studi lapangan (*field research*) di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Pendekatan yuridis-empiris diterapkan untuk mengkaji secara eksplisit bagaimana implementasi norma hukum Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dijalankan dalam realitas sosial, yang selanjutnya dianalisis melalui kerangka evaluatif *siyasah tanfidziyyah* (Arikunto, 2005).

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*), sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur *fiqh siyasah* dan artikel ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah. Untuk memperkuat kredibilitas penelitian, penentuan informan utama dilakukan secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria pemahaman mendalam, keterlibatan langsung, serta wewenang dalam kebijakan penanggulangan permukiman kumuh di lokasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan 2 (dua) informan utama, yaitu 1 (satu) orang Ketua RT 007 Lingkungan 009 di Kelurahan Way Lunik sebagai representasi masyarakat yang memahami kondisi fisik dan dinamika warga di tingkat tapak, serta 1 (satu) orang dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan Way Lunik sebagai

representasi birokrasi yang memiliki kewenangan administratif dan teknis pembangunan di wilayah setempat (Sulun & Muspawi, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada para informan utama, observasi langsung terhadap kondisi infrastruktur dan kebersihan lingkungan, serta studi dokumentasi regulasi dan arsip pemerintah. Guna menjamin kredibilitas dan keabsahan data (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan serta mengecek ulang informasi dari Ketua RT 007 Lingkungan 009 Kelurahan Way Lunik dengan keterangan dari pihak Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan Way Lunik, lalu dikonfirmasi dengan dokumen hukum. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara terhadap fakta fisik hasil observasi di lapangan.

Teknik analisis data dijalankan secara kualitatif-deduktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menyandingkan fakta empiris implementasi kebijakan di Kelurahan Way Lunik dengan ketentuan normatif Pasal 31 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017, kemudian dievaluasi menggunakan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyyah* seperti *al-'adl* (keadilan), *amanah*, *hifz al-huquq* (perlindungan hak), dan akuntabilitas publik untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif (Pujiati, 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

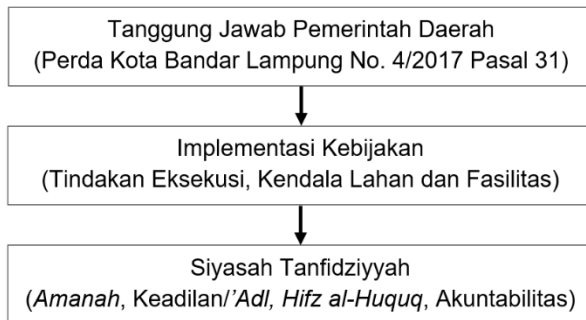
Penanggulangan permukiman kumuh merupakan bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara atas hunian yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. (Karimuna et al., 2024)

Kebijakan di bidang ini tidak hanya mencerminkan kapasitas teknis pemerintah daerah tetapi juga menunjukkan sejauh mana norma hukum yang telah ditetapkan mampu diimplementasikan secara efektif dalam praktik pemerintahan maka evaluasi terhadap penanggulangan permukiman kumuh perlu dilakukan dengan menempatkan implementasi kebijakan sebagai fokus utama analisis, bukan semata-mata pada tataran normatif peraturan perundang-undangan. (Rohmadiani & Sahliyah, 2023)

Kajian teori dalam penelitian ini mendasarkan analisisnya pada keterkaitan antara tiga konsep utama yaitu *siyasah tanfidziyyah*, implementasi

kebijakan publik, dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Hubungan Tanggung Jawab Pemda, Implementasi Kebijakan, dan Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*



- A. *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan cabang *fiqh siyasah* yang mengatur kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh kekuasaan eksekutif. Konsep ini menetapkan bahwa tindakan pemerintah wajib berorientasi pada kemaslahatan rakyat (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-mashlahah*) yang diukur melalui prinsip *amanah*, keadilan (*al-'adl*), dan perlindungan hak-hak dasar (*hifz al-huquq*).
- B. Implementasi Kebijakan dan Tanggung Jawab Pemda berdasarkan asas desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014), pemerintah daerah bertanggung jawab penuh menjamin ketersediaan hunian layak. Integrasi *siyasah tanfidziyyah* mempertegas bahwa tanggung jawab Pemda atas Pasal 31 Perda No. 4/2017 tidak berhenti pada pencapaian administratif, melainkan pada pemenuhan kesejahteraan riil dan akuntabilitas publik.

Konteks hukum tata negara Islam disini membahas pelaksanaan kebijakan publik yang mengandung dimensi etis dan normatif yang menuntut adanya tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang amanah kekuasaan. (Apriliya, 2023) Perspektif *siyasah tanfidziyyah* menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik harus diukur dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan kemaslahatan masyarakat. Hasil dari pembahasan dalam artikel ini yang berdasarkan dari kerangka tersebut maka hal ini diarahkan untuk mengkaji implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 dalam penanggulangan permukiman kumuh serta menilai praktik pelaksanaannya di lapangan melalui perspektif *siyasah tanfidziyyah* sebagai instrumen

evaluatif kebijakan publik daerah. (Wöhler et al., 2026)

A. Konsep *Siyasah Tanfidziyyah* dalam Konteks Penanggulangan Permukiman Kumuh

Siyasah tanfidziyyah merupakan bagian dari kajian *fiqh siyasah* yang membahas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam rangka mengimplementasikan hukum dan kebijakan demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. *Siyasah tanfidziyyah* dalam konteks ini menempatkan penguasa atau pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik yang tidak hanya terikat pada norma hukum formal tetapi juga pada nilai-nilai etis dan tujuan syariat. Fokus utama *siyasah tanfidziyyah* adalah bagaimana kekuasaan eksekutif dijalankan secara efektif, bertanggung jawab dan juga mampu berorientasi pada kepentingan rakyat yang mengerucut pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Penanggulangan permukiman kumuh merupakan salah satu bentuk konkret kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti halnya tempat tinggal yang layak, lingkungan yang sehat dan juga rasa aman yang dihadirkan. Pemenuhan kebutuhan tersebut dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah* juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan *maqasid al-syari'ah* terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kemaslahatan hidup masyarakat. (Zulkhah & Garside, 2022) Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan permukiman kumuh tidak dapat dipandang semata-mata sebagai program teknis penataan ruang melainkan sebagai kewajiban pemerintahan untuk menjamin kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Konsep *siyasah tanfidziyyah* menekankan beberapa prinsip fundamental dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan antara lain seperti amanah, keadilan dan juga tanggung jawab. Prinsip amanah mengharuskan pemerintah melaksanakan kebijakan secara konsisten dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Prinsip keadilan menuntut agar kebijakan publik diterapkan secara proporsional dan tidak diskriminatif terutama terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi lemah seperti

warga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh. Sementara itu, prinsip tanggung jawab meniscayakan adanya mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang dilaksanakan baik kepada masyarakat maupun secara moral.

Siyasah tanfidziyyah dalam konteks pemerintahan daerah sendiri juga memberikan kerangka normatif untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan kewenangannya dalam penanggulangan permukiman kumuh. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tetapi juga dari dampak nyata kebijakan tersebut terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jika kebijakan hanya berhenti pada perencanaan atau bersifat simbolik tanpa realisasi yang berkelanjutan maka peran pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *siyasah tanfidziyyah* (Aldiyantoro et al., 2026).

Konsep *siyasah tanfidziyyah* dalam penanggulangan permukiman kumuh dengan demikian berfungsi sebagai alat analisis normatif dan etis untuk menilai praktik kebijakan publik daerah. Pendekatan ini memungkinkan adanya evaluasi yang lebih komprehensif terhadap peran pemerintah daerah yang tidak hanya dari sudut pandang hukum positif saja melainkan juga dapat dilihat dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama pemerintahan dalam Islam. Oleh karena itu, integrasi konsep *siyasah tanfidziyyah* dalam analisis kebijakan penanggulangan permukiman kumuh menjadi relevan dan signifikan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Biswas, 2020)

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017

Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 merupakan norma sentral yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan permukiman kumuh. Ketentuan ini secara yuridis menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.

Norma tersebut mencerminkan pelaksanaan asas desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal (Zulaika, 2024).

Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 merupakan langkah krusial untuk memahami sejauh mana kerangka hukum formal mampu mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat di Kelurahan Way Lunik.

Pasal ini mengatur mengenai kewajiban dan wewenang pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang meliputi pembangunan infrastruktur, perbaikan rumah serta penyediaan fasilitas dasar. Terdapat diskrepansi antara bunyi pasal tersebut dengan fakta hukum terkait status lahan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar warga di wilayah Way Lunik menempati tanah yang diklaim sebagai aset PT. BCKA (Besar Cipta Karya). Status tanah ini seringkali menjadi sandungan yuridis bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan fisik permanen karena regulasi keuangan daerah seringkali mensyaratkan status lahan yang *clean and clear* sebelum anggaran pembangunan dapat dikucurkan. (Gnangnon & Chen, 2026)

Ketidakefektifan penanggulangan permukiman kumuh di Kelurahan Way Lunik khususnya di wilayah bagian atas berakar pada keterbatasan ruang gerak pemerintah daerah dalam menafsirkan Pasal 31 ketika berhadapan dengan konflik agraria. Program bedah rumah pernah menyentuh wilayah ini, namun intervensi besar terakhir justru dilakukan oleh TNI pada 2021/2022. Hal ini menandakan program tersebut belum berjalan rutin melalui APBD berbasis Perda. Hal ini mengindikasikan bahwa secara yuridis pemerintah daerah masih memerlukan terobosan hukum atau kebijakan diskresi yang kuat untuk mengatasi kebuntuan administrasi lahan. Pasal 31 seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban membangun fisik semata, tetapi juga mencakup upaya pemerintah untuk melakukan mediasi legalitas atau

memberikan kepastian hak huni bagi masyarakat agar program peningkatan kualitas permukiman tidak terhambat oleh status kepemilikan tanah yang belum tuntas.

Tinjauan yuridis ini juga menyoroti aspek pengawasan dan evaluasi yang diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut. Setiap kebijakan harus memiliki mekanisme kontrol yang jelas agar tujuan pembersihan permukiman kumuh dapat tercapai. Masyarakat merasakan adanya kekosongan dalam proses pengawasan yang di mana program seperti gotong royong hanya berjalan secara situasional dan tidak memiliki keberlanjutan sistemik yang kuat (Dahal, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya melekat pada regulasi tersebut belum dilaksanakan secara optimal oleh instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi pemahaman terhadap Pasal 31 agar tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan di atas kertas tetapi juga mencakup penegakan aturan kebersihan lingkungan dan penyediaan sarana prasarana seperti armada sampah yang merata hingga ke pelosok pemukiman di Way Lunik. (Zuhdi et al., 2024) Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin efektivitas implementasi kebijakan apabila tidak didukung oleh mekanisme operasional yang jelas dan konsistensi pelaksanaan. (Suntana & Priatna, 2023)

Hasil yang dapat disimpulkan dari analisis ini menggarisbawahi bahwa Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 telah memberikan dasar hukum yang penting bagi pemerintah daerah dalam penanggulangan permukiman kumuh namun masih memerlukan penguatan baik secara normatif maupun implementatif. (Kusumawati & Susanto, 2022) Penguatan tersebut menjadi prasyarat agar kebijakan penanggulangan permukiman kumuh tidak berhenti pada tataran formalitas hukum tetapi mampu mewujudkan tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana dikehendaki oleh hukum positif dan prinsip *siyasah tanfidziyyah*.

C. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Permukiman Kumuh melalui Analisis Hukum dan Praktik Lapangan

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan permukiman kumuh dalam kerangka hukum pada pemerintahan daerah merupakan konsekuensi langsung dari prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk dalam penyediaan hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 secara normatif menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagaimana diketahui dan ditegaskan dalam Pasal 31 yang mengatur kewajiban perencanaan, pelaksanaan dan juga pengendalian kebijakan penataan permukiman. (Disperakim, 2025)

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan permukiman kumuh merupakan manifestasi dari fungsi pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan hunian yang sehat dan bersih sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan dipertegas melalui peraturan daerah. Praktik di lapangan Kelurahan Way Lunik justru menunjukkan adanya jurang pemisah antara tanggung jawab normatif tersebut dengan realisasi program yang dirasakan masyarakat. Salah satu temuan krusial adalah adanya persepsi bahwa kebijakan yang dijalankan saat ini belum sepenuhnya efektif. Ketidakefektifan ini seringkali dipicu oleh kurangnya “keberanian” politik dalam melakukan intervensi pada wilayah yang secara administratif bermasalah seperti permukiman di atas tanah milik PT. BCKA (Besar Cipta Karya). (Dahal, 2024)

Hal ini menciptakan dilema tanggung jawab yang di mana di satu sisi pemerintah terikat aturan anggaran yang ketat namun di sisi lain memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada warganya. Untuk memahami sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah telah terimplementasi perlu dilihat terlebih dahulu kondisi objektif

di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa variabel kunci yang menjadi hambatan dalam penataan kawasan ini sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 : Identifikasi Permasalahan dan Kondisi Eksisting Permukiman

Variabel Pengamatan	Kondisi Eksisting di Kelurahan Way Lunik	Keterangan / Sumber Data
Lokasi Kerawanan	Terpusat di wilayah bagian atas (dataran tinggi).	Hasil wawancara tokoh masyarakat.
Status Kepemilikan Lahan	Mayoritas menempati lahan negara/aspek PT. BCKA.	Kendala utama legalitas bantuan fisik.
Kualitas Hunian	Pernah ada bantuan bedah rumah (TNI, 2021/2022).	Kondisi fisik bangunan mulai menurun.
Sistem Kebersihan	Program “Gotong Royong” (bersifat situasional/insidental).	Belum ada sistem pengangkutan rutin harian.

Analisis praktik lapangan menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah sering kali bersifat reaktif dan seremonial terlihat dari pelaksanaan program kebersihan seperti gotong royong yang cenderung dilakukan hanya pada momentum tertentu misalnya menjelang bulan puasa. Hal ini menandakan belum adanya sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam agenda harian pemerintah kelurahan maupun kota (Dahal, 2024). Masyarakat menyuarakan kebutuhan yang sangat mendasar namun krusial seperti penyediaan fasilitas motor pengangkut sampah (*Tossa*) dan gerobak sampah untuk menjangkau gang-gang sempit di wilayah bagian atas. Ketidakhadiran fasilitas ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab praktisnya dalam memfasilitasi kebersihan lingkungan agar wilayah Way Lunik tidak terus terjebak dalam kondisi kumuh dan kotor.

Tanggung jawab pemerintah mencakup aspek amanah dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dalam konteks ini berarti warga di Kelurahan Way

Lunik terlepas dari kerumitan status lahan yang mereka tempati mereka berhak mendapatkan akses yang sama terhadap sanitasi dan pengelolaan limbah yang layak. Rekomendasi yang muncul dari praktik lapangan menekankan perlunya perbaikan nyata melalui penyediaan sarana prasarana yang menyentuh akar masalah bukan sekadar kunjungan lapangan oleh pejabat daerah tanpa tindak lanjut yang sistematis. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah harus bertransformasi dari sekadar kepatuhan administratif menjadi komitmen etis untuk memberikan jaminan kebersihan dan kesehatan lingkungan bagi seluruh warga Way Lunik guna mencapai target wilayah bebas permukiman kumuh. (Dahal, 2024)

Temuan lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan realisasi di tingkat kelurahan. Program penanggulangan permukiman kumuh cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi dan juga minimnya pelibatan masyarakat secara substantif menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan permukiman yang layak dan berkelanjutan. (Wijaya, 2022)

Aspek akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan permukiman kumuh juga masih memerlukan penguatan. Mekanisme evaluasi dan pelaporan publik terhadap capaian program belum berjalan secara sistematis sehingga menyulitkan pengukuran keberhasilan kebijakan secara objektif. Konteks tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dijalankan sesuai dengan tujuan regulasi dan kepentingan masyarakat. (Sitio et al., 2024) Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola kebijakan agar penanggulangan permukiman kumuh tidak hanya bersifat administratif tetapi mampu menghasilkan perubahan substantif bagi kesejahteraan masyarakat. (Firdaus et al., 2024)

D. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap peran pemerintah daerah pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Permukiman Kumuh

Pemerintah Daerah pada perspektif *siyasah tanfidziyyah* di sini diposisikan sebagai pelaksana kebijakan dan hukum yang memikul amanah kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui tindakan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab dan juga berorientasi pada kepentingan publik. (Dinas Perumahan, 2022) Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif tidak berhenti pada pembentukan norma hukum melainkan menuntut pelaksanaan kebijakan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam *Q.S. An-Nisa'* ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (*Q.S. An-Nisa [4]:58*)

Ayat ini menegaskan kewajiban penguasa untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam menjalankan kekuasaan. Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa penyelenggaraan kebijakan publik termasuk penanggulangan permukiman kumuh yang merupakan bagian dari amanah kekuasaan yang harus dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab.

Prinsip amanah dalam *siyasah tanfidziyyah* menuntut pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan penanggulangan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan dengan menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama kebijakan. Amanah tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan administratif terhadap peraturan daerah tetapi juga sebagai komitmen moral untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam sabdanya yang berbunyi :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. (HR Imam Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis ini juga memperkuat pandangan bahwa pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas eksekutif memiliki tanggung jawab langsung atas kondisi sosial masyarakat termasuk kualitas lingkungan permukiman yang mereka huni (Ruslin, 2024).

Prinsip lain seperti prinsip keadilan (*al-'adl*) juga merupakan elemen fundamental dalam menilai peran pemerintah daerah. Keadilan dalam *siyasah tanfidziyyah* menghendaki kebijakan yang tidak diskriminatif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok rentan yang terdampak langsung oleh kondisi permukiman kumuh. *Al-Qur'an* secara tegas memerintahkan penegakan keadilan dalam *Q.S. Al-Mā'idah* ayat 8 dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (*Q.S. Al-Mā'idah [5] : 8*)

Ayat ini juga yang menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi kepentingan atau tekanan tertentu pada konteks kebijakan penanggulangan permukiman kumuh yang dimana ayat ini juga menjadi dasar normatif bahwa pemerintah daerah wajib merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang adil serta sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat bukan sekadar menerapkan

program yang bersifat seragam dan administratif.

Prinsip perlindungan hak (*hifz al-huquq*) juga menempati posisi penting dalam *siyasah tanfidziyyah* khususnya mengerucut pada pembahasan terkait hak masyarakat atas hunian yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Islam memandang pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) yang mencakup perlindungan jiwa dan kemaslahatan hidup. Kebijakan penanggulangan permukiman kumuh seharusnya tidak hanya berorientasi pada penataan fisik tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang dirasa belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan maka prinsip perlindungan hak dalam *siyasah tanfidziyyah* belum terimplementasi secara optimal. (Rahayu et al., 2024)

Prinsip akuntabilitas publik menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. *Siyasah tanfidziyyah* memandang akuntabilitas sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam *Q.S. Az-Zalzalah* pada ayat 7 dan 8 yang berbunyi :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
حَسَنًا يَرَهُ ۚ

Artinya : 7. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya, 8. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap perbuatan sekecil apa pun akan dimintai pertanggungjawaban. Konteks pemerintahan daerah dalam ayat ini mengandung makna normatif bahwa setiap kebijakan publik termasuk penanggulangan permukiman kumuh harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan penanggulangan permukiman kumuh oleh pemerintah daerah masih memerlukan penguatan agar selaras dengan prinsip *siyasah tanfidziyyah*. (Rachmatika et al., 2024) Meskipun kerangka hukum positif telah memberikan dasar kewenangan yang jelas

namun pada praktik pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan amanah, keadilan, perlindungan hak dan akuntabilitas publik sebagaimana ditegaskan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis*. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai *siyasah tanfidziyyah* dalam pelaksanaan kebijakan publik daerah menjadi penting sebagai landasan normatif dan etis untuk mewujudkan penanggulangan permukiman kumuh yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. (Dahal, 2024)

4. Penutup

A. Simpulan Penelitian

- 1) Implementasi Kebijakan Belum Optimal: Secara normatif, Pasal 31 Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum penanggulangan permukiman kumuh. Namun, implementasinya di Kelurahan Way Lunik belum optimal akibat hambatan legalitas tanah aset PT BCKA, program pengangkutan sampah yang bersifat insidental, serta minimnya sistem pengawasan.
- 2) Kesenjangan Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*: Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), perlindungan hak (*hifz al-huquq*), dan akuntabilitas publik karena pelayanan dasar warga masih terhambat oleh kendala administratif lahan.

B. Rekomendasi dan Saran

- 1) Pemerintah Kota Bandar Lampung: Memformulasi kebijakan diskresi atau regulasi teknis khusus untuk memberikan akses pelayanan dasar (sanitasi dan pengangkutan sampah) pada kawasan kumuh yang berdiri di atas lahan bersengketa.
- 2) Dinas Perumahan dan Aparatur Kelurahan: Menyediakan sarana operasional harian (seperti motor sampah Tossa) serta menginternalisasi nilai-nilai *siyasah tanfidziyyah* dalam tata kelola lingkungan yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

5. Referensi

- Aldiyantoro, J., Mu'in, F., & Latua, A. (2026). A Fiqh *Siyasah* Review of the Implementation of Article 64 of the Bandar Lampung

- Municipal Regulation on Public Order. *Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 11(2), 267–288.
- Anger, E., Ramos, I., & Leandro, D. (2025). Governance, development, and environment : Pathways to a sustainable future. *Journal Sustainable Futures (Scopus)*, 10(December 2024), 100813. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2025.100813>
- Apriliya, T. (2023). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Penanggulangan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai Provinsi Riau. In *Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/view/19257%0Ahttps://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/download/19257/6074>
- Arikunto, S. (2005). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi V). Rineka Kerja.
- Biswas, A. (2020). Establishing metropolitan governance and local governance simultaneously : Lesson from India's 74th Constitutional amendment act. *Journal of Urban Management (Scopus)*, 9(3), 316–330. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.06.002>
- Dahal, G. (2024). Nepal's experience in implementing the federal government system : Assessment of law-making by the local governments of Kaski district, Nepal. *Journal Heliyon (Scopus)*, 10(4), e26250. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26250>
- Dinas Perumahan. (2022). *Program Kotaku di Aceh Tengah*. Dinas Perumahan Dan Permukiman Aceh Tengah. <https://disperkim.acehtengahkab.go.id/halaman/program-kotaku>
- Disperakim. (2025). *Kawasan Permukiman Kumuh: Definisi, Kriteria, dan Upaya Penanganannya di Indonesia*. Disperakim Kabupaten Klaten. <https://disperakim.klaten.go.id/kawasan-permukiman-kumuh-definisi-kriteria-dan-upaya-penanganannya-di-indonesia>
- Firdaus, M. A., Indrawan, R., Hafidah, N., & Ristiawati, R. (2024). Pendekatan Berbasis Lingkungan Untuk Pencegahan Permukiman Kumuh di Kawasan Lahan Basah Kota Banjarmasin. *Seminar Nasional Lahan Basah*, (September), 1–19.
- Gnangnon, K., & Chen, P. (2026). From institutions to jobs : How governments' compliance with constitutional rules reshapes sectoral employment in Sub-Saharan Africa. *Journal of Government and Economics (Scopus)*, 21(April). <https://doi.org/10.1016/j.jge.2026.100172>
- Hakim, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kotaku Dalam Menangani Masalah Permukiman Kumuh Di Kelurahan Ratusima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasin Riau*.
- Karimuna, S. R., Aryani, D., Ali, H., Meinar, A., Rantisari, D., Achmad, B. K., & Manik, S. E. (2024). *Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Perkotaan*. Penerbit CV. Eureka Media Aksara.
- Kusumawati, S., & Susanto, D. N. (2022). Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Cicendo Kota Bandung. *Jurnal Geoplanart*, x(648).
- Mirza, M. R. (2024). Evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Ponto, G. D., & Pangemanan, S. E. (2022). Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Singkil Kota Manado (Studi Kasus di Kelurahan Kombos Timur). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–14.
- Pratama, A. (2022). Implementasi Program KOTAKU : Studi Penanganan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Kelurahan Lappa, Kabupaten Sinjai. In *Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Pujiati. (2024). *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan*. Deep Publish. <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>
- Rachmatika, S., Fitratunnisa, S., Aji, C. H. P., Dewita, P., & Diva, R. (2024). Kajian Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Perspektif Islam. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 4(2), 233–242. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v4i2.12729>
- Rahayu, P. D., Isa, R., Tohopi, R., & Gorontalo, U. N. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. *Publik : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11, 390–399.

- Rangga, M. (2026). Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Berkembangnya Permukiman Kumuh Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 65 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perspektif Siyash Tanfiziyyah. In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Rohmadiani, L. D., & Sahliyah, M. (2023). Vulnerability of Slum Settlements of Krian Village to Fire Disasters. *Urban and Regional Planning*, 02(01), 113–127.
- Ruslin, A. S. I. (2024). Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palopo. In *Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Setiadi, A. (2022). Tipologi dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Bontang. *Jurnal Tata Loka*.
- Sitio, A. D., Kurnia, D., & Wulandari, W. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. *Jurnal Praxis Idealis : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 01(01).
- Sulun, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(2), 28–33.
- Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. *Journal Heliyon (Scopus)*, 9(January).
- Wijaya, D. W. (2022). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 1–10.
- Wöhler, L., Arentsen, M., Bakhanova, E., & Warbroek, B. (2026). An institutional perspective on integrating climate and societal challenges in urban areas. *Journal Climate Risk Management (Scopus)*, 100829. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2026.100829>
- Zuhdi, S., Rusli, B., Buchari, M., & Sugandi, Y. S. (2024). *Jejaring Kebijakan Pengelolaan Permukiman Kumuh* (Cetakan Pe). Penerbit Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/568864/jejaring-kebijakan-pengelolaan-permukiman-kumuh#id-section-content>
- Zulaika. (2024). Tata Ruang Wilayah Kota Malang (Studi Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kampung Heritage Kajoetangan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018). In *Universitas Merdeka Malang*.
- Zulkah, S., & Garside, A. K. (2022). Penanganan Permukiman Kumuh pada Kawasan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. *Jurnal Proceedings Seminar Keinsinyuran*, 8, 163–172.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).